

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

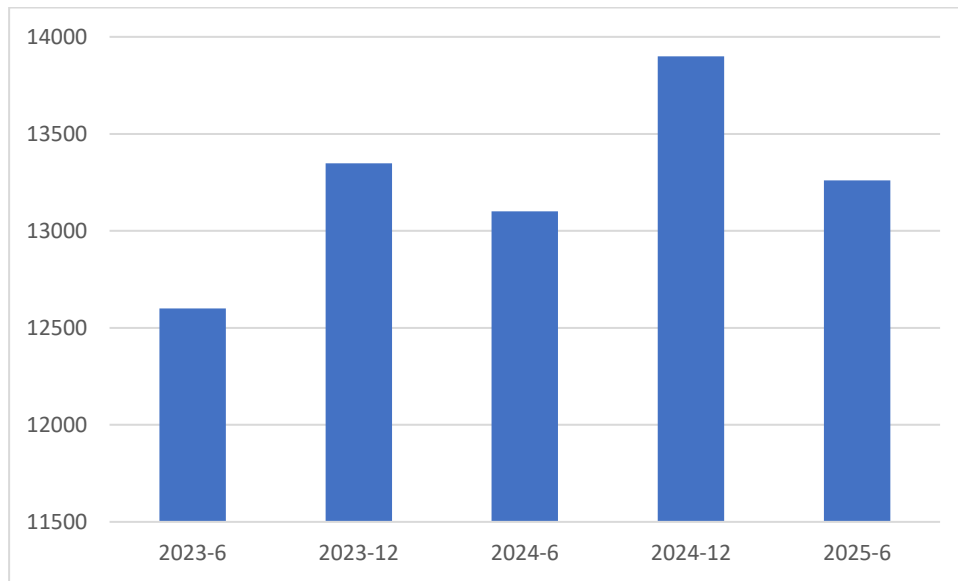
Pembangunan sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama pembangunan. Di antara seluruh komoditas pangan yang ada, beras menempati posisi paling sentral karena merupakan makanan pokok bagi hampir seluruh penduduk Indonesia. BPS (2022) mencatat bahwa sekitar 98,35% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber pangan utama. Lebih dari itu, beras berkontribusi sebesar 36,94% dari total konsumsi kalori per kapita per hari dan 28,18% dari total konsumsi protein nasional (BPS, 2025). Angka-angka ini menempatkan beras bukan sekadar komoditas ekonomi biasa, melainkan sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional yang memengaruhi stabilitas sosial dan kesejahteraan jutaan rumah tangga secara langsung.

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadikan komoditas ini sangat sensitif terhadap setiap perubahan kondisi pasar, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun kebijakan pemerintah. Perubahan harga beras, sekecil apapun, memiliki implikasi yang luas terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk pangan (Tanduk, 2025). Oleh karena itu, stabilisasi

harga beras menjadi salah satu agenda kebijakan paling kritis yang harus dikelola pemerintah secara berkelanjutan.

Dalam kerangka teoritis ekonomi, harga suatu komoditas terbentuk melalui mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2018), harga merupakan sinyal ekonomi yang mencerminkan kelangkaan relatif suatu barang. Dalam konteks beras, ketika pasokan melampaui permintaan, harga cenderung turun sebaliknya, ketika permintaan melampaui pasokan, harga akan mengalami tekanan ke atas. Namun demikian, mekanisme ini tidak selalu berjalan secara sempurna, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur distribusi dan ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah.

Pada tingkat nasional, dinamika harga beras selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga beras nasional bergerak dalam rentang Rp12.900–Rp13.348 per kilogram pada semester pertama 2023, kemudian mengalami fluktuasi namun secara konsisten meningkat hingga mencapai Rp13.268 per kilogram pada awal semester II 2025. Meskipun kenaikan di tingkat nasional terlihat moderat, tekanan harga yang sesungguhnya justru jauh lebih terasa di wilayah-wilayah yang bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti wilayah timur Indonesia. Adapun gambaran perkembangan tersebut disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Gambar 1. 1 Harga Beras Nasional Per Semester (Rupiah/kg)

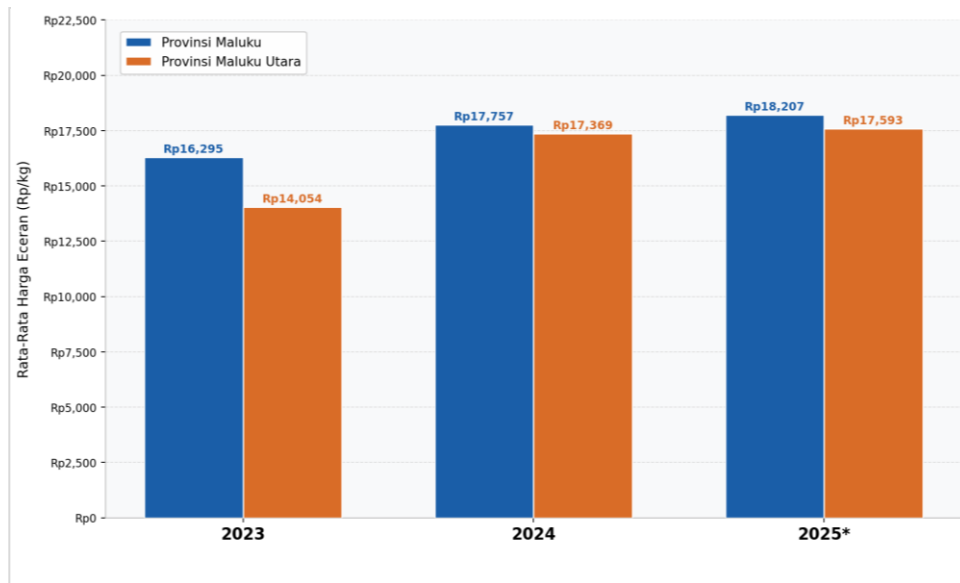
Berdasarkan Gambar 1.1, pergerakan harga beras nasional per semester menunjukkan tren yang secara umum meningkat meskipun dengan laju yang moderat. Pada Semester I 2023, harga beras nasional berada di kisaran Rp12.900 per kilogram, kemudian meningkat bertahap hingga Rp13.348 pada Semester II 2023. Terdapat sedikit koreksi ke bawah pada awal 2024 ke level Rp12.902 per kilogram, namun tren kenaikan kembali berlanjut sepanjang 2024 hingga 2025. Pola fluktuasi ini mengindikasikan adanya tekanan struktural yang persisten pada sisi pasokan maupun rantai distribusi beras nasional. Yang lebih krusial untuk dicermati adalah bahwa kenaikan harga di tingkat nasional ini tidak mencerminkan secara proporsional kondisi yang dialami oleh wilayah-wilayah non-produsen di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku.

Provinsi Maluku dipilih sebagai objek penelitian ini bukan tanpa alasan yang kuat. Terdapat sejumlah fakta empiris mengenai provinsi ini dan juga kondisi

struktural yang menjadikan Maluku sebagai wilayah yang paling relevan dan mendesak untuk dikaji dalam konteks dinamika harga beras eceran untuk konsumsi Masyarakat di Provinsi Maluku.

Kondisi geografis Provinsi Maluku ialah berupa gugusan kepulauan yang tersebar luas, dengan begitu menyebabkan biaya transportasi dan logistik untuk komoditas beras di Maluku secara struktural lebih tinggi. Rachman (2018) dalam studinya tentang disparitas harga antar daerah menemukan bahwa biaya distribusi beras di wilayah kepulauan bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan wilayah daratan. Biaya logistik yang tinggi ini langsung ditransmisikan ke dalam harga jual beras di tingkat konsumen, sehingga menciptakan gap konsisten yang memicu ketidaksamaan antara harga di Maluku dengan harga nasional.

Untuk memperkuat argumentasi tentang keunikan dan urgensi Provinsi Maluku sebagai objek penelitian, perbandingan dengan provinsi tetangga yaitu Provinsi Maluku Utara memberikan gambaran yang lebih utuh tentang dinamika harga beras di kawasan timur Indonesia. Kedua provinsi ini memiliki karakteristik geografis yang serupa sebagai wilayah kepulauan, namun menunjukkan pola pergerakan harga beras yang menarik dan berbeda untuk dikaji secara komparatif. Untuk menjelaskan lebih mendalamnya peneliti menyajikan pada gambar yang bisa dilihat sebagai berikut:



Sumber: Databoks (data diolah, 2025)

Gambar 1. 2 Perbandingan Harga Beras Provinsi Maluku dan Maluku Utara Per Tahun (Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.2, perbandingan rata-rata harga eceran beras premium antara Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara selama periode 2023–2025 mengungkapkan beberapa pola yang sangat informatif. Pada tahun 2023, terdapat disparitas yang cukup mencolok antara kedua provinsi. Rata-rata harga beras premium di Provinsi Maluku mencapai Rp16.295 per kilogram, sementara di Provinsi Maluku Utara hanya berada pada kisaran Rp14.054 per kilogram dengan selisihnya mencapai Rp2.241 per kilogram. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada periode awal, tekanan harga di Provinsi Maluku jauh lebih berat dibandingkan Maluku Utara.

Memasuki tahun 2024, terjadi perubahan pola yang signifikan. Harga di Provinsi Maluku Utara mengalami lonjakan yang jauh lebih tajam dibandingkan Provinsi Maluku, sehingga kedua provinsi berkonvergensi pada level yang hampir

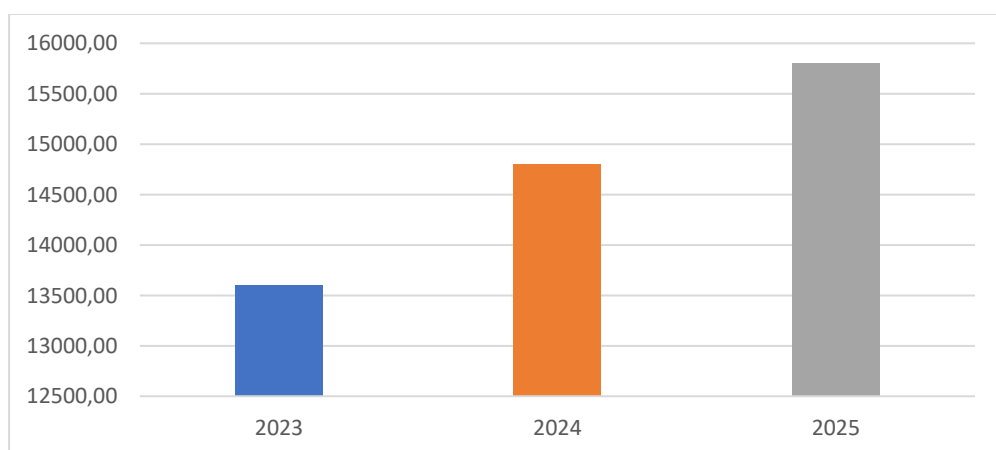
setara. Rata-rata harga beras premium di Provinsi Maluku tercatat Rp17.757 per kilogram, sedangkan di Provinsi Maluku Utara mencapai Rp17.369 per kilogram dengan selisih yang menyempit drastis menjadi hanya Rp388 per kilogram. Lonjakan harga yang lebih dramatis di Maluku pada 2024 ini mengindikasikan bahwa dampak tekanan harga nasional seperti kenaikan HPP gabah dan gangguan distribusi yang diteruskan secara lebih kuat ke wilayah tersebut pada periode tersebut.

Pada periode Januari–Agustus 2025, harga di kedua provinsi kembali menunjukkan divergensi. Rata-rata harga beras premium di Provinsi Maluku meningkat menjadi Rp18.207 per kilogram, sementara di Provinsi Maluku Utara berada di kisaran Rp17.593 per kilogram. Secara konsisten, harga di kedua provinsi sepanjang periode pengamatan berada di atas HET beras premium Zona 3 yang berlaku (Rp15.800 per kilogram). Fakta ini menegaskan bahwa HET belum mampu meredam kenaikan harga beras di kedua wilayah kepulauan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, Provinsi Maluku menjadi fokus utama karena menunjukkan level harga yang secara konsisten lebih tinggi dan laju kenaikan yang lebih persisten dibandingkan Maluku Utara.

Dengan begitu menunjukkan bahwa selisih harga beras antara Maluku dan rata-rata nasional semakin membesar dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2023 selisihnya berada di kisaran Rp2.000–Rp3.000 per kilogram, pada 2025 selisih tersebut telah melampaui Rp4.000 per kilogram. Tren melebar ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor struktural yang menekan harga beras di Maluku semakin kuat,

dan kebijakan harga yang berlaku saat ini belum mampu menjembatani kesenjangan tersebut secara efektif (Harahap, Nasution & Tambunan, 2025).

Salah satu instrumen kebijakan paling langsung yang dirancang untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen adalah Harga Eceran Tertinggi (HET). HET merupakan batas maksimum harga jual beras yang ditetapkan pemerintah, bertujuan menjaga keterjangkauan harga beras bagi konsumen, terutama rumah tangga berpendapatan rendah (Lestari, 2023). Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020, beras diklasifikasikan ke dalam tiga kelas mutu, yaitu premium, medium 1, dan medium, di mana masing-masing kelas memiliki besaran HET yang berbeda berdasarkan zonasi wilayah (Aulia Martina et al., 2024). Untuk Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua, HET beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram dan beras premium sebesar Rp15.800 per kilogram berdasarkan Perbadan Nomor 5 Tahun 2024. Adapun gambaran perkembangan tersebut disajikan pada gambar berikut:

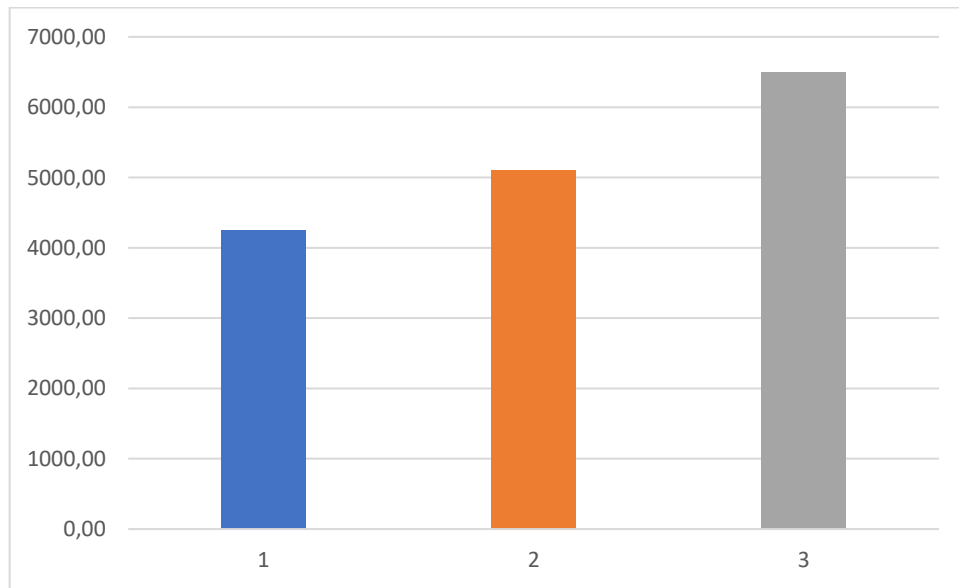


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2025

Gambar 1. 3 Perkembangan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Per Tahun 2023–2025 (Rupiah/kg)

Berdasarkan Gambar 1.3, kebijakan HET beras telah mengalami tiga kali penyesuaian selama periode 2023–2025. Pada awal 2023, HET beras premium Zona 3 ditetapkan sebesar Rp13.600 per kilogram berdasarkan Perbadan Nomor 7 Tahun 2023. Kemudian pada Maret 2024, pemerintah melakukan relaksasi sementara HET menjadi Rp14.800 per kilogram sebagai respons atas lonjakan harga beras yang terjadi secara nasional. Selanjutnya, melalui Perbadan Nomor 5 Tahun 2024 yang berlaku sejak Juni 2024, HET beras premium Zona 3 kembali disesuaikan menjadi Rp15.800 per kilogram dan bertahan hingga periode penelitian ini. Meskipun HET terus mengalami penyesuaian ke atas, data lapangan menunjukkan bahwa harga beras di Provinsi Maluku secara konsisten berada jauh di atas batas HET yang berlaku, yang mengindikasikan lemahnya efektivitas kebijakan ini dalam mengendalikan harga di wilayah kepulauan.

Di sisi hulu rantai pasok, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko penurunan harga pada saat panen raya. HPP berfungsi sebagai harga dasar (*price floor*) yang menjamin petani memperoleh pendapatan minimum yang layak dari hasil produksinya, sekaligus memberikan insentif untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan (Tinjung & Maria, 2019). Dalam mekanismenya, HPP ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar, sehingga pemerintah melalui Bulog dapat menyerap kelebihan produksi petani pada saat panen raya untuk dijadikan cadangan pangan nasional. Adapun gambaran perkembangan tersebut disajikan pada gambar berikut:



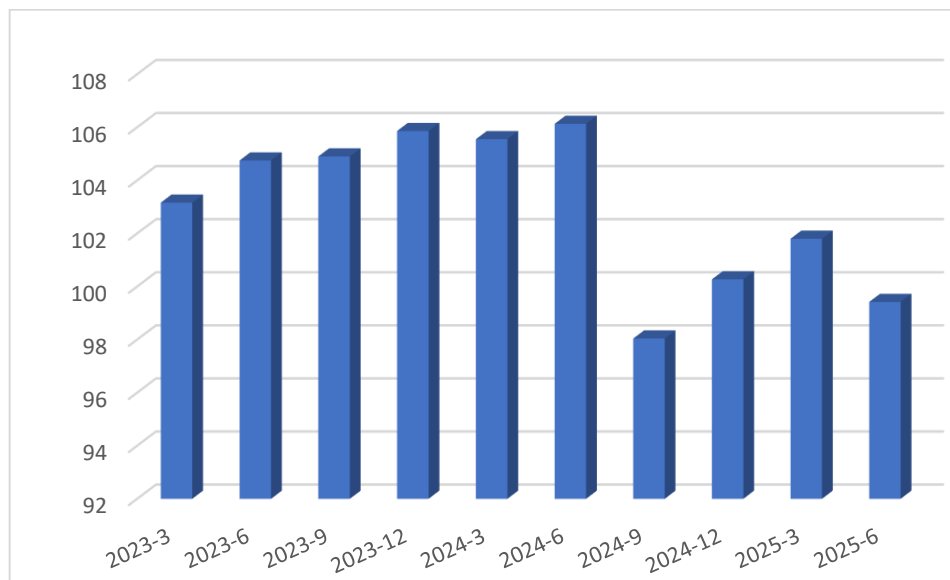
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2025

Gambar 1. 4 Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Per Tahun 2023–2025 (Rupiah/kg)

Berdasarkan Gambar 1.4, HPP gabah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan bertahap selama periode 2023–2025. Pada awal 2023, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp4.250 per kilogram. Memasuki pertengahan 2023, HPP meningkat menjadi Rp5.100 per kilogram seiring dengan penyesuaian regulasi Bapanas untuk mengakomodasi kenaikan biaya produksi padi. Lonjakan paling signifikan terjadi pada awal 2024, ketika HPP dinaikkan secara substansial hingga mencapai Rp6.100 per kilogram melalui Perbadan Nomor 4 Tahun 2024 — suatu kenaikan yang mencerminkan upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi. Selanjutnya, mulai akhir 2024 hingga 2025, HPP terus bergerak naik ke kisaran Rp6.500 per kilogram. Kenaikan HPP yang konsisten ini, meskipun bertujuan melindungi petani, memiliki implikasi tidak langsung terhadap harga beras di tingkat konsumen melalui

mekanisme transmisi harga, karena pedagang dan distributor menyesuaikan harga beli mereka dengan HPP yang berlaku (Rosanti et al., 2021).

Selain kebijakan harga, kondisi kesejahteraan petani juga merupakan faktor penting yang memengaruhi dinamika pasokan dan harga beras. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dari penjualan hasil produksi dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk kebutuhan konsumsi dan input produksi. Apabila $NTP > 100$, petani mengalami surplus dan berada dalam kondisi sejahtera apabila $NTP < 100$, petani mengalami defisit karena biaya yang dikeluarkan melebihi pendapatan yang diterima dan apabila $NTP = 100$, petani berada dalam kondisi impas atau *break even* (BPS, 2011). Adapun gambaran perkembangan tersebut disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2025

Gambar 1. 5 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku Per Triwulan 2023–2025 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.5, perkembangan NTP tanaman pangan di Provinsi Maluku selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada awal 2023, NTP berada di kisaran 103%–106%, yang menandakan kondisi ekonomi petani yang masih relatif baik dengan pendapatan yang sedikit melampaui biaya. Namun, memasuki Triwulan II 2024, NTP mulai mengalami penurunan yang berkelanjutan hingga menyentuh titik terendahnya di kisaran 98%–99% pada pertengahan 2024, yang berarti petani masuk ke dalam zona defisit. Pola penurunan NTP ini mencerminkan kenyataan bahwa kenaikan biaya produksi — terutama pupuk, benih, dan upah tenaga kerja — berlangsung lebih cepat dibandingkan kenaikan harga gabah yang diterima petani (Yulianti et al., 2023). Penurunan kesejahteraan petani yang tercermin dari melemahnya NTP ini berpotensi mengurangi motivasi dan kapasitas produksi padi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi ketersediaan pasokan dan harga beras di pasar.

Provinsi Maluku bukan merupakan daerah sentra produksi padi nasional. Luas lahan sawah yang relatif terbatas dan kondisi topografi kepulauan yang tidak ideal untuk pertanian padi skala besar menjadikan kapasitas produksi padi lokal di Maluku jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya. Sebagian besar kebutuhan beras Maluku terpaksa dipasok dari luar provinsi, sehingga produksi padi lokal lebih berperan sebagai penyangga pasokan pada periode-periode tertentu daripada sebagai sumber utama. Kondisi ini menjadikan harga beras di Maluku sangat rentan terhadap perubahan produksi padi di sentra penghasil nasional maupun gangguan dalam rantai distribusi antarprovinsi. Adapun gambaran perkembangan tersebut disajikan pada gambar berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2025

Gambar 1. 6 Perkembangan Jumlah Produksi Padi Provinsi Maluku Per Tahun 2023–2025 (Ton)

Berdasarkan Gambar 1.6, jumlah produksi padi di Provinsi Maluku selama periode 2023–2025 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor musim tanam, curah hujan, serta keterbatasan lahan produktif. Produksi padi Maluku yang tidak stabil dan relatif rendah ini semakin memperkuat argumentasi tentang tingginya ketergantungan wilayah ini terhadap pasokan beras dari luar daerah. Suryana et al. (2014) menegaskan bahwa daerah dengan kapasitas produksi padi yang rendah dan tidak stabil memiliki posisi tawar yang lemah dalam rantai distribusi beras, sehingga harga yang harus dibayar konsumen cenderung lebih tinggi. Harianto (2018) menambahkan bahwa daerah dengan ketergantungan pasokan yang tinggi juga memiliki harga beras yang lebih responsif terhadap perubahan produksi di sentra penghasil padi, sehingga guncangan produksi di Jawa atau Sulawesi dapat secara langsung memengaruhi harga beras di pasar Maluku.

Dengan demikian, memasukkan variabel jumlah produksi padi dalam model penelitian ini secara empiris dan teoritis menjadi sangat relevan.

Dengan luas lahan sawah yang terbatas dan kapasitas produksi padi lokal yang jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, hampir seluruh kebutuhan beras Maluku bergantung pada pasokan yang didatangkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatra. Kondisi ini menjadikan harga beras di Maluku sangat rentan terhadap gangguan distribusi, kenaikan biaya logistik antarpulau, dan perubahan kebijakan harga di tingkat nasional (Firmansyah & Sari, 2025). Karakteristik ketergantungan pasokan yang tinggi ini berbeda secara fundamental dari daerah sentra produksi yang lazim menjadi objek kajian penelitian serupa.

Keempat variabel yang telah diuraikan diantaranya Harga Eceran tertinggi, Harga Pembelian Pemerintah (gabah), Nilai tukar petani, dan Jumlah produksi padi, membentuk suatu sistem yang saling terhubung dan secara bersama-sama memengaruhi pergerakan harga rata-rata eceran beras di Provinsi Maluku. Adanya Kenaikan HPP di tingkat hulu mendorong kenaikan biaya pengadaan beras bagi pedagang dan distributor melemahnya nilai tukar petani akibat tekanan biaya produksi berpotensi mengurangi pasokan gabah dari petani. Fluktuasi produksi padi lokal yang rendah dan tidak stabil memperlemah daya tahan pasokan Maluku terhadap guncangan eksternal. Sementara HET yang seharusnya menjadi rem bagi kenaikan harga justru belum mampu berfungsi secara efektif di tengah kondisi biaya distribusi yang tinggi dan rantai pasok yang panjang. Kombinasi tekanan dari berbagai arah inilah yang menjadi pendorong utama mengapa harga beras di

Provinsi Maluku terus meningkat secara konsisten dan jauh melampaui level harga nasional.

Sejumlah studi empiris telah mengkaji hubungan antara variabel-variabel kebijakan pangan dengan dinamika harga beras, meskipun sebagian besar tidak secara spesifik menyorot wilayah kepulauan non-produsen seperti Maluku. Penelitian Putri (2021) menemukan bahwa efektivitas HET sangat bergantung pada struktur distribusi dan tingkat kepatuhan pedagang, sehingga kebijakan ini tidak selalu mampu menahan harga beras di tingkat konsumen pada kondisi biaya logistik yang tinggi suatu temuan yang sangat relevan dengan konteks Maluku. Studi Saputra (2014) menunjukkan adanya hubungan kausal antara HPP dan harga beras, meskipun transmisi harga dari tingkat produsen ke konsumen tidak sepenuhnya proporsional karena diselingi oleh berbagai biaya di sepanjang rantai pasok.

Asrin (2022) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa transmisi harga dari HPP ke harga eceran dipengaruhi secara signifikan oleh gangguan pasar serta biaya penggilingan dan distribusi yang bervariasi antardaerah. Eddy (2023) menemukan bahwa nilai tukar petani berpengaruh signifikan terhadap harga beras di tingkat pabrik penggilingan, di mana penurunan NTP secara statistik berkaitan dengan peningkatan variabilitas harga beras premium. Suryana et al. (2014) menunjukkan bahwa fluktuasi produksi padi di sentra penghasil berpengaruh terhadap harga beras di daerah non-produsen melalui mekanisme transmisi pasokan antardaerah, yang merupakan mekanisme utama yang berlaku di Provinsi Maluku.

Penelitian-penelitian tersebut secara keseluruhan mengonfirmasi bahwa kebijakan harga pemerintah, kondisi kesejahteraan petani, dan kapasitas produksi padi saling berinteraksi dalam memengaruhi harga beras di pasar. Namun, tidak satu pun dari studi-studi tersebut yang secara khusus mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam satu model empiris dengan fokus pada wilayah kepulauan non-produsen seperti Provinsi Maluku, sehingga terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan yang perlu diisi.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan empat variabel penting dalam sistem perberasan nasional yaitu Harga Eceran Tertinggi, Harga Pembelian Pemerintah, Nilai tukar petani, dan jumlah produksi padi ke dalam satu model empiris yang komprehensif, sementara sebagian besar penelitian terdahulu hanya menganalisis hubungan parsial. Kedua, penelitian ini secara khusus mengambil Provinsi Maluku sebagai objek kajian, wilayah kepulauan non-produsen dengan karakteristik distribusi dan biaya logistik yang unik dan berbeda dari daerah sentra produksi yang lazim diteliti. Ketiga, penelitian ini menggunakan data bulanan periode Januari 2023–Agustus 2025 yang mencakup masa pasca penyesuaian HPP dan dinamika kenaikan harga beras terkini. Keempat, penelitian ini memposisikan Nilai tukar petani sebagai variabel penghubung antara kebijakan harga di hulu dan harga beras di hilir, sekaligus menempatkan jumlah produksi padi sebagai cerminan sisi penawaran yang melengkapi pemahaman mengenai transmisi harga dan ketahanan pangan di Provinsi Maluku.

Berdasarkan seluruh uraian fenomena, urgensi, *research gap*, dan kebaruan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Harga Eceran Tertinggi Beras, Harga Pembelian Pemerintah (Gabah), Nilai Tukar Petani, dan Jumlah Produksi Padi Terhadap Harga Beras di Provinsi Maluku Periode Januari 2023–Agustus 2025.”** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik melalui analisis hubungan empiris antarvariabel dalam konteks wilayah kepulauan, serta kontribusi praktis melalui rekomendasi kebijakan harga pangan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap karakteristik unik Provinsi Maluku.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah (gabah), nilai tukar petani dan jumlah produksi padi secara parsial terhadap harga beras di provinsi maluku periode Januari 2023-Agustus 2025?
2. Bagaimana pengaruh harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah (gabah) , nilai tukar petani dan jumlah produksi padi secara bersama-sama terhadap harga beras di provinsi maluku periode Januari 2023-Agustus 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah (gabah) , nilai tukar petani dan jumlah produksi padi secara parsial terhadap harga beras di provinsi maluku periode Januari 2023-Agustus 2025.
2. Menganalisis pengaruh harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah (gabah) , nilai tukar petani dan jumlah produksi padi secara bersama-sama terhadap harga beras di provinsi maluku periode Januari 2023-Agustus 2025.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengetahui pengaruh keadaan harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah (gabah) , nilai tukar petani dan jumlah produksi padi terhadap harga beras di provinsi maluku periode Januari 2023-Agustus 2025 sebagai bahan informasi bagi peneliti lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan harga eceran tertinggi beras, harga pembelian pemerintah (gabah) , nilai tukar petani dan jumlah produksi padi serta harga beras di provinsi maluku.

[illegible]